

Pemkot Madiun Rombak 52 Pejabat, Empat JPTP Kosong



Bupati Madiun Hari Wuryanto

12 Gerai KDKMP Madiun Terkendala Izin Lahan

Madiun, Memorandum

Progres pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Madiun tidak sepenuhnya lancar. Pasalnya, sejumlah pembangunan harus ditangguhkan lantaran masih terkendala administrasi lahan.

Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebutkan, setidaknya ada 12 titik yang masih menunggu persetujuan dari Kementerian Kehutanan karena berada di lahan milik Perhutani.

“Kita sudah berkomunikasi bahkan bersurat untuk mendapatkan izin mendirikan Program Presiden di lahan milik Perhutani,” sebutnya, Kamis (13/8).

Ia mengaku, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun terus proaktif untuk mempercepat turunnya perizinan dari tingkat Kementerian. Salah satunya, dengan komunikasi dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

“Makanya kita minta tolong ke Pak Menteri. Mudah-mudahan Pak Menteri Desa berkemu-

nikasi dengan Menteri Kehutanan supaya segera regulasinya dibuka, kemudian rekomendasi untuk perizinan diturunkan,” terangnya.

Menurut Hari, hal tersebut merupakan bentuk sinergitas antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia memastikan, jika perizinan tersebut telah turun maka pembangunan ke-12 titik itu akan segera dikebut.

“Mudah-mudahan itu *clear*. Karena itu programnya Pak Prabowo, masa mau nentang Presiden,” ucapnya sembari bercanda.

Sementara itu, Hari mengungkapkan, per Bulan Agustus sebanyak 104 gerai KDKMP sudah selesai dibangun. Kemudian sekitar 53 kepengurusan KDKMPK di Kabupaten Madiun sudah mulai beroperasi.

“Kita sebetulnya sudah *ready*, tinggal *tools*-nya yang masih belum siap. Seperti gerai KDKMP, memang saat ini belum ada penyerahan gerai,” tandasnya. (aji/nov)

Madiun, Memorandum

Susunan pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemkot Madiun dirombak.

Sebanyak 52 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendapat posisi baru secara resmi dilantik di gedung GCIO Kota Madiun, Jumat (14/8).

Dari puluhan pejabat yang dirombak, terdapat pergeseran rangkaian kepala bagian (kabag) serta kepala bidang (kabid).

Seperti Kabag Umum Setda Kota Madiun yang semula diduduki Anita Maharani, diambil alih Sulistanti Purwaningtyastuti. Sedangkan Anita Maharani bergeser sebagai Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Madiun.

Menyikapi pergeseran sejumlah pejabat, Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun meminta pejabat yang berpindah organisasi perangkat daerah (OPD) maupun bidang tetap mengawal pekerjaan yang sebelumnya ditangani. Setidaknya hingga sejumlah agenda yang telah dipersiapkan rampung.

“Ini kegiatan besar yang masih berjalan. Teman-teman persiapannya juga sudah jalan. Karena mereka pindahnya tidak dalam satu dinas, saya minta tetap ikut mengawal,” ujarnya.

Bagus menjelaskan, pengawalan yang dimaksud itu termasuk kegiatan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI hingga agenda pada 19 Agustus. Bagus tak ingin perpindahan personel membuat pekerjaan yang sudah dipersiapkan menjadi berantakan.

Di sisi lain, pejabat yang menempati posisi baru dituntut cepat beradaptasi. Apalagi, waktu efektif tahun anggaran 2026 semakin pendek. Pemkot masih harus membenahi sejumlah program bersamaan dengan proses perubahan APBD.

“Tentunya ini pekerjaan baru bagi yang pindah dinas atau pindah bidang. Pola kerja



Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun melantik pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di gedung GCIO Kota Madiun, Jumat (14/8).

pemerintah kota sudah saya ubah. Semuanya berjalan sesuai rules dan harus dijalankan dengan baik,” tegasnya.

Sementara itu, Bagus mengakui terdapat kursi pejabat kosong masih menumpuk. Kepala BKPSDM Kota Madiun Haris Rahmanudin menyebut sekitar 24 jabatan masih lowong. Jumlah tersebut juga memper-

timbangankan ASN yang bakal memasuki masa pensiun hingga Desember mendatang.

“Lebih kurang ada 24-an. Sebagian prosesnya melalui mutasi. Yang akan kita ajukan nanti juga memperhitungkan yang pensiun sampai Desember. Masih proses,” ungkap Haris.

Pelantikan terbaru juga menyentuh jabatan fungsional. Salah satunya Sekretaris Bakesbangpol yang bergeser menjadi

pejabat fungsional ahli madya di Inspektorat.

Khusus Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau Eselon II, proses pengisian juga terus bergulir. Bagus menyebut tahapan seleksi untuk posisi yang tengah dibuka masih berjalan. Berdasarkan perkembangan terakhir, persyaratan jumlah pelamar disebut telah terpenuhi.

“Saya belum dapat laporan berapa yang sudah mendaftar. Tetapi beberapa hari kemarin secara syarat sudah memenuhi,” jelas Bagus.

Empat kursi JPTP lainnya yang masih kosong juga bakal diproses sesuai mekanisme. Pemkot telah mengajukan proses pengisiannya, tetapi masih menunggu tahapan berikutnya.

Haris membenarkan pengisian eselon II membutuhkan mekanisme tersendiri. Terlebih, beberapa posisi saat ini masih dijabat pelaksana tugas (Plt). “Eselon II kemarin sudah berproses. Mekanismenya tetap kami sampaikan ke Kemendagri,” pungkasnya. (ggi/nov)

JPU KPK Rampungkan Pembuktian Kasus Korupsi Maidi

Madiun, Memorandum

Pembuktian dakwaan oleh JPU KPK terhadap perkara dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi, Kepala DPUPR Thariq Megah, serta Direktur CV Sekar Arum Rochim Ruhdiyanto dipastikan selesai.

Total sebanyak 63 orang telah dihadirkan JPU sebagai saksi maupun ahli.

Terakhir, JPU menghadirkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof Dr Hibnu Nugroho dan Dosen sekaligus Pakar Hukum Ad-

ministrasi Negara serta Hukum Keuangan Publik di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAYJ) Dr W Riawan Tjandra sebagai saksi ahli dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (13/8).

“Hari ini ada dua ahli yang kami hadirkan. Satu ahli hukum pidana, satu ahli hukum administrasi negara,” kata JPU KPK Ikhsan Fernandi.

Ikhsan mengatakan, kehadiran dua ahli tersebut makin memperkuat pembuktian dakwaan JPU terkait dugaan pemerasan dan gratifikasi.

Dia menilai keterangan ahli sangat krusial dalam menguraikan modus operasi yang dilakukan oleh para terdakwa, khususnya terkait penggunaan klaim dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Menurut Ikhsan, ahli hukum pidana yang dihadirkan memberikan pandangan yang sejalan dengan poin-poin dakwaan, khususnya terkait penetapan pasal 12 e dan pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Menurut kami sudah mendukung pembuktian. Pasal perbuatan pasal 12 e dan 12 B terkait dengan gratifikasi yang dilakukan,” jelasnya.

Sementara itu, lanjut Ikhsan, ahli hukum administrasi negara membedah aspek penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh terdakwa Maidi selaku kepala daerah. Terdakwa dinilai menggunakan pengaruh jabatannya untuk memaksa penyerahan sejumlah uang dengan dalih CSR.

“Kekuasaan selaku wali kota yang memaksa untuk memberikan sejumlah uang dengan nama uang penggantian terse-



Ikhsan Fernandi

but. Menurut kami juga sudah dapat diperkuat oleh keterangan pendapat ahli tersebut. Ada penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan,” ujar Ikhsan.

Ikhsan menegaskan, istilah dana CSR yang selama ini dimunculkan oleh pihak terdakwa hanya

modus untuk menutupi praktik pemerasan.

Berdasarkan fakta persidangan dan aturan hukum yang berlaku, pengelolaan dana CSR harus memiliki mekanisme, SOP, serta tim fasilitator resmi. Dalam praktiknya, seluruh prosedur tersebut ditabrak dan melanggar aturan.

Selain itu, juga tidak ditemukan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dokumen kontrak, maupun pertanggungjawaban fisik pekerjaan yang sah dari pendanaan dana CSR. Apalagi penunjukan kepada Rochim Ruhdiyanto selaku rekanan pelaksana sekadar lisan.

“Jadi CSR itu sebenarnya menurut kami ya tidak sah. Tidak sebagaimana prosedur SOP sebagaimana di perda maupun perwal yang harus ada prosedur, mekanisme yang dilaksanakan. Tapi ini tidak ada, melanggar, langsung menunjuk ke satu orang,” ungkapinya. (ggi/nov)



Rapat Paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI, Jumat (14/8).

DPRD Kabupaten Madiun Dorong Stabilitas Ekonomi Daerah

Madiun, Memorandum

DPRD Kabupaten Madiun menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan HUT ke-81 RI tahun 2026 di Ruang Rapat, Jumat (14/8).

Pada kesempatan tersebut Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah capaian kinerja pemerintah pusat, salah satunya mengenai ketahanan pangan.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono mengaku, *output* utama tersebut sedianya telah tercapai sejak beberapa tahun lalu. Ia menilai, Kabupaten Madiun telah tuntas dengan program swasembada pangan.

“Pada prinsipnya kalau di In-

donesia itu dinilai swasembada pangan, kita sudah sejak dulu. Kita memang mampu menyediakan apa kebutuhan masyarakat kaitan dengan pangan,” ujarnya usai memimpin jalannya rapat.

Menurut Fery, masyarakat Kabupaten Madiun cenderung menginginkan kestabilan ekonomi. Sehingga, saat ini di tengah tantangan efisiensi, pihak legislatif bersama eksekutif akan terus mendorong pemanfaatan anggaran secara optimal guna mencapai target keberhasilan pembangunan.

“Masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Madiun sebenarnya menginginkan kestabilan ekonomi. Harapannya ekonomi bisa stabil dari pusat sampai ke daerah bawah,” terangnya.

Sementara, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengutarakan komitmennya untuk terus bersinergi dan menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo.

“Apa yang menjadi program kami di daerah itu selaras dengan apa yang menjadi cita-cita Presiden, kita sinergi dengan pusat,” ucapnya.

Ia mencontohkan, pada sektor ketahanan pangan, Kabupaten Madiun menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah penyangga pangan yang produktif. Terlebih, kini kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Madiun telah mencapai status surplus. “Meskipun menghadapi tantangan musim kemarau, para petani di Madiun pasti tetap panen,” pungkasnya. (adv/aji/nov)

Waduk Pondok Surut, Warga Garap Lahan Tepian

Ngawi, Memorandum

Sejumlah warga di Desa Dampit dan Kenongorejo, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi memanfaatkan lahan di sekitar tepian Waduk Pondok untuk lahan pertanian.

Pemanfaatan lahan ini telah sering kali dilakukan di musim kemarau saat volume waduk surut. Suwarno, seorang warga setempat mengatakan, pemanfaatan lahan waduk sudah dilakukan secara turun temurun bersama warga lainnya.

Penanaman tersebut dilakukan di tepi waduk yang masih cukup air untuk menanam padi, jagung dan tembakau, serta kacang tanah. “Kami memanfaatkan lahan yang masih ada

airnya untuk tanam padi dan jagung. Cuma bisa pas kemarau, kalau air naik ya berhenti,” katanya.

Ia menuturkan, aktivitas tanaman tepi waduk hanya bisa dilakukan di bulan Juli hingga Oktober saat puncak musim kemarau. Namun demikian, ketika sudah memasuki musim hujan dan volume waduk naik maka gagal panen. Terlebih, di sekitar wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan dan batu sehingga sangat sulit untuk pertanian.

Pun, ada sekitar 4 desa yang memanfaatkan tepi waduk sebagai lahan pertanian, meliputi Desa Dampit, Surung, Kenongorejo, dan Desa Gandong Kecamatan Bringin.



Warga tepian waduk pondok saat melakukan aktivitas di lahan garapannya.

“Musim kemarau ini juga bisa dikatakan menjadi berkah bagi warga di sekitaran Waduk Pondok,” pungkasnya. (ris/dik/nov)

DPRD Ngawi Gelar Rapat Paripurna Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI

Ngawi, Memorandum

DPRD Kabupaten Ngawi menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Jumat (14/8).

Kegiatan yang berlangsung di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko yang juga dihadiri Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dan Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko serta unsur forkompimda dan jajaran Pemkab Ngawi.

Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko menjelaskan, bahwa Rapat Paripurna ini merupakan rangkaian dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Tentunya dalam pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto terkait dengan ketahanan pangan di Indonesia, dan hal tersebut selaras dengan Kabupaten



Suasana Rapat Paripurna di kantor DPRD Kabupaten Ngawi pada Jumat (14/8).

Ngawi sebagai lumbung pangan nasional. “Pidato ini merupakan rangkaian HUT Kemerdekaan RI ke-81,” katanya.

Yuwono menyampaikan, dengan program ketahanan pangan ini maka perlu diimplentasikan ke daerah dan dipertahankan sebagai pilar ketahanan pangan nasional.

Selain itu, program strategis nasional yakni Sekolah Rakyat yang ada di daerah tidak hanya menjadi monumen saja akan tetapi bagaimana sekolah rakyat ini dapat menampung

anak-anak yang tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi ditengah keterbatasan kemampuan orang tuanya.

“Dua hal itu yang perlu dikawal dan dijalankan di pemerintah daerah sebagai program pemerintah pusat,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menuturkan, pidato tadi terkait dengan arahan program strategis nasional tentang swasembada pangan juga kemandirian energi tersebut maka harus bisa menjalankan di pemerintah daerah guna mendukung Asta Cita Presiden RI.

Tentunya sinergi kolaborasi dengan stakeholder pemangku kebijakan dapat menumbuhkan kembangkan apa yang menjadi harapan pemerintah pusat seiring sejalan di Kabupaten Ngawi juga mendorong percepatan program strategis nasional.

“Kami akan mendukung dan menjalankan arah kebijakan serta program strategis nasional pemerintah pusat,” pungkasnya. (adv/ris/dik/nov)